



NIKAH
Bupati Agam Andri Warman dan Kapolres Agam, AKBP Muhammad Agus Hidayat menjadi saksi pernikahan Septyana Nur Chaulia Decita, putri Sekda Agam, Edi Busti, Sabtu (27/4). (ist)

Bupati dan Kapolres Jadi Saksi Pernikahan Putri Sekda Agam

Agam, Singgalang

Bupati Agam, Andri Warman dan Kapolres Agam, AKBP Muhammad Agus Hidayat, menjadi saksi pernikahan Septyana Nur Chaulia Decita, putri Sekda Agam, Edi Busti.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Agam, Khasman Zaini menyampaikan, prosesi akad nikah Sep-

tyana dan Jari Dorste, dilakukan Sabtu (27/4) pagi.

"Akad nikah sekira pukul 09.00 WIB di panggung utama GOR Rang Agam. Bertindak sebagai saksi nikah, Bapak Bupati dan Kapolres Agam," kata nya.

Prosesi pernikahan putri Sekda Agam ini dilangsungkan dalam nuansa islami dan adat Minangkabau. Prosesi

berlangsung bilingual, Bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan ke Bahasa Inggris.

Prosesi akad nikah berlangsung khidmat.

"Prosesi dimulai dengan pembacaan ayat Alquran oleh Qori Kabupaten Agam. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi akad nikah dan nashiat pernikahan," katanya. (210)

Ekonomi Kreatif Bantu Warga Keluar dari Kemiskinan



SOSIALISASI PERDA - Anggota DPRD Sumbar Syafruddin Putra Dt. Sunggono saat menyosialisasi perda pengembangan ekonomi kreatif di Dharmasraya, baru-baru ini. (ist)

DHARMASRAYA-SINGGALANG

Berinovasi dan menjalankan usaha ekonomi kreatif, bisa membantu masyarakat keluar dari kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sumbar, Syafruddin Putra Dt. Sunggono saat menyosialisasi Peraturan daerah (perda) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di daerah pemilihannya Ka-

bupaten Dharmasraya, baru-baru ini.

Menurut Syafruddin, perda tentang pengembangan ekonomi kreatif ini bisa menjadi salah satu solusi efektif untuk menyelesaikan permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Sumbar.

"Siapapun dan dimana pun bisa membuka usaha berbasis ekonomi kreatif. Perda Nomor 2 Tahun 2023 ini telah menegaskan regulasi tentang kewajiban pemerintah mendukung

usaha ekonomi kreatif masyarakat," kata Syafruddin.

Kemudian, lanjutnya, selain pengangguran, ibu rumah tangga, PNS, pensiunan juga bisa memulai membuka usaha ekonomi kreatif. "Jika ini kita gencarkan maka permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Sumbar secara umum akan terlesaikan," katanya.

Sumbar, lanjut Syafruddin, memiliki banyak potensi yang bisa dikem-

bangkan sebagai ide usaha ekonomi kreatif. Provinsi ini amat kaya akan adat, budaya, kuliner dan banyak hal lain.

"Kuliner dan fashion salah satu contohnya, ini sudah banyak yang mengembangkannya menjadi usaha ekonomi kreatif dan masih sangat terbuka luas untuk terus diinovasikan menjadi sumber usaha baru," ujarnya.

Ia menilai, masyarakat Sumbar mesti serius dengan potensi ekonomi kreatif. Sektor ini dinilai bisa menjadi magnet yang menarik wisatawan datang ke Sumbar.

"Selama ini saya melihat anak-anak muda banyak memiliki ide inovatif hebat dalam hal ekonomi kreatif. Hanya saja, mereka tak tahu harus membawa dan mengembangkan ide itu ke arah mana," ujarnya.

Sekarang, lanjut Syafruddin, telah ada Perda tentang ekonomi kreatif yang bisa menjadi solusi. Di dalam perda tersebut telah diatur banyak hal yang menyokong perkembangan ekonomi kreatif di Sumbar. (401)

Pastikan Ketersediaan Pangan Stabil



RAKOR - Rapat koordinasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Agam bersama Bappeda, BPS serta OPD terkait lainnya. (ist)

Agam, Singgalang

Pemerintah Kabupaten Agam sepakati beberapa hal, sebagai upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil dan terjangkau bagi masyarakat daerah itu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Agam, Rosva Des-

wira, Sabtu (27/4) meng-

takan, hal yang disepakati yaitu, peningkatan produksi pangan domestik, memperkuat stabilitas harga pangan, memperkuat sistem data pangan dan menyusun kebijakan serta program pangan yang terintegrasi.

"Upaya ini ditetapkan

dalam rapat koordinasi DKPP bersama Bappeda, BPS serta OPD terkait lainnya sebelumnya," katanya.

Selain penetapan beberapa hal itu, juga dilakukan pembahasan mengenai penyusunan prognoza Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan (NBM) 2024. "Prognoza ini menjadi acuan bagi kita dalam mengambil kebijakan terkait ketahanan pangan di Kabupaten Agam," katanya.

Dengan begitu, sangat diperlukan sinergi antar instansi agar penyusunan prognoza ini jadi dasar kuat bagi Pemkab Agam, dalam mengambil kebijakan yang tepat dan efektif untuk memastikan ketersediaan pangan yang stabil. (210)

Sertu Jimmy Albert Sampaikan Pesan-pesan Kamtibmas

Pd. Pariaman, Singgalang

Babinsa Koramil 03/Sungai Sarik Sertu Jimmy Albert menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada warga binaannya terkait gangguan Kamtibmas pasca penetapan hasil sengketa Pemilu 2024, di Kantor Nagari Tandikek Barat, Kecamatan Patamuhan.

Selain itu, Babinsa juga bertukar pikiran serta mendengar keluhan kesah warga binaannya agar bisa lebih dekat lagi antara pihak Koramil dengan warga.

Babinsa juga menyampaikan jangan mudah terprovokasi dengan berita hoax, yang belum tentu kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk mening-



DIALOG - Babinsa dan Bhabinkamtibmas berdialog dengan perangkat Nagari Tandikek Barat Kecamatan Patamuhan. (*)

katkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Kehadiran Babinsa, untuk lebih terjalinnya tali silaturahmi dan warga juga merasakan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mening-

katkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Kehadiran Babinsa, untuk lebih terjalinnya tali silaturahmi dan warga juga merasakan kehadiran TNI di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mening-



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG KHATIB SULAIMAN

Jalan khatib Sulaiman No.65 Belanti Barat, Kel.Lolong Belanti Kec.Padang Utara
Telepon : 0751-443749; Facsimile : 0751-443748
Website : www.bri.co.id
Email : C0669@corp.bri.co.id

PENGUMUMAN No. B 744.-KC-III/LYI/04/2024

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan, bahwa nama-nama tersebut dibawah ini dinyatakan sudah tidak menjadi karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Khatib Sulaiman :

No	Nama Pekerja	Unit Kerja BRI Sebelumnya	Terhitung Mulai Tanggal
1	Rifaldi	BRI Unit Lubuk Begalung	18 April 2024

Maka atas segala sesuatu Tindakan yang dilakukan oleh yang nama-namanya tercantum dalam pengumuman ini sudah tidak menjadi tanggung jawab kami, dan yang bersangkutan sudah **TIDAK** dapat mengatasnamakan **PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**

Selanjutnya terkait dengan pembayaran kewajiban nasabah (Hutang, Pokok, Bunga, Administrasi dan Penalty) agar dilakukan melalui :

- Pembayaran melalui setoran ke Rekening Simpanan masing-masing Nasabah di Bank BRI dan/ atau
- Pembayaran langsung di Kantor Bank BRI melalui setoran dihadapan petugas Bank (Teller) dan melalui e-Channel bri.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Kantor Cabang Khatib Sulaiman**

Ttd

Ary Juwono
Pemimpin Cabang

Tindakan:
1. Arsip

PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS PT. BANK NAGARI PERIODE 2024-2027 Jl. Jend Sudirman No. 51 Padang

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI CALON KOMISARIS PT BANK NAGARI PERIODE 2024-2027

- Panitia telah melaksanakan Seleksi Administrasi terhadap 11 (sebelas) orang Bakal Calon Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Bakal Calon Komisaris Non Independen pada tanggal 26 April 2024.
- Berdasarkan hasil seleksi Administrasi Bakal Calon Komisaris Independen dan Non Independen yang dinyatakan lulus adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT
BAKAL CALON KOMISARIS INDEPENDEN		
1.	Ahmad Wira	Jalan Karang Ganting No 07 Ampang Padang
2.	Edrizanof	Jalan Pondok Kopi I Nomor 22 RT. 003 RW. 002 Kelurahan Surau Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
3.	Manar Fuadi	Jalan Singgalang Nomor 44 RT 006 RW 003 Kelurahan Gunung Panglun Kecamatan Padang Utara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
4.	Mohiddin Sadar	Jl. Merdeka Kasang No. 13 Nagari Kasang, Kab Padang Pariaman
5.	Muslim MK	Jl. Medan No. 2 Asratak Ulak Karang, Padang
6.	Sutan Emir Hidayat	Komplek Taman Laguna Blok J No.1 RT0201, Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat
7.	Yori Taстан	Jl. Sosiologi I A-19 Komp PGRI Surau Gadang Kec. Nanggalo Padang
8.	Yorinaki	Jln. Patanangan, Perumahan Tanah Kasik No. 5 Gulai beach, Bukittinggi Sumatera Barat

NO	NAMA	ALAMAT
BAKAL CALON KOMISARIS NON INDEPENDEN		
1.	Andri Yulika	Perumahan Wahana 6, Blok B, No.4 RT/RW : 003/003 Kel. Kalumbuk, Kec. Kuranji Kota Padang
2.	Amy Yuswandi	Jl. Pagai Kel. Cappel, Blok B5, Kel. Koto Panjang Ikuwa Koto, Kec. Koto Tangah, Kota Padang
3.	Medi Iowandi	Jl. TVRI No.3, RT/RW 003/005, Kel. Jati, Kec. Padang Timur, Kota Padang

- Keputusan Panitia bersifat mengikat, mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.





FOTO BERSAMA - Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Tarmizi Ismail berfoto bersama dengan perwakilan 9 partai politik di Kota Padang usai sosialisasi Permendagri No.36 Tahun 2018.



SERAHKAN BUKU - Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Tarmizi Ismail menyerahkan buku panduan tentang Permendagri No.36 Tahun 2018 kepada peserta.

KESBANGPOL PADANG SOSIALISASIKAN PERMENDAGRI NO.36 TAHUN 2018

Bantuan Keuangan Partai Politik Harus Digunakan Secara Baik dan Tepat Sasaran

PADANG - Kota Padang menargetkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 mendatang sukses.

Tak hanya sukses dalam pelaksanaan, namun juga sukses terpilih walikota pilihan rakyat dan sukses semakin meningkatnya partisipasi pemilih di Pilkada Kota Padang tersebut.

Kesuksesan itu juga tak terlepas dari partai politik yang menjadi pengusung dan pendukung para calon walikota dan walikota Padang ke depan. Aktivitas partai politik di Kota Padang juga dipengaruhi oleh bantuan keuangan dari Pemko Padang.

Menyikapi itu, Badan Kesbangpol Kota Padang memberikan pemahaman kepada partai politik yang ada di kota ini untuk bagaimana menggunakan bantuan dana partai politik dari pemerintah.



JELASKAN - Nara sumber menjelaskan tentang Permendagri No.36 Tahun 2018 kepada peserta.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Padang, Tarmizi Ismail didampingi Kepala Bidang Politik dalam Negeri (Poldagri) Indriati kepada Singgalang mengatakan, guna mewujudkan penggunaan bantuan keuangan partai politik itu secara baik, tepat sasaran dan

sesuai aturan maka dilakukan sosialisasi Permendagri No.36 Tahun 2018 tentang tata cara penghitungan dan penggunaan bantuan keuangan partai politik di aula Bappeda Kota Padang, Jumat (26/4) lalu.

Sosialisasi tersebut meliputi tata cara penghitungan, peng-



ANTUSIAS - Peserta sosialisasi Permendagri No.36 Tahun 2018 melakukan tanya jawab dengan antusiasnya.

anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD.

Dikatakan Tarmizi, tahun 2023 bantuan keuangan untuk

partai politik sudah dianggarkan untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Padang sebesar Rp2.250 persatu suara pada surat suara sah. Untuk saat ini terdapat 9 partai politik pada tahun 2023 yang mendapatkan bantuan keuangan dari Pemko Padang.

Menurutnya, pada tahun 2024 ini bertepatan dengan pemilu dan pilkada. Bantuan untuk 9 partai politik tahun 2024 ini hanya diberikan untuk 8 bulan sesuai dengan akhir periode jabatan parpol yang lama. Selanjutnya akan diberikan bantuan 4 bulan ke depan pada tahun 2024 untuk partai politik yang baru setelah dilantik nantinya sebanyak 10 partai politik di Kota Padang.

Rencana bantuan keuangan yang akan diberikan untuk 4 bulan (September-Desember) pada tahun 2024 direncanakan naik sebesar Rp4.500 dari suara sah atau mengalami kenaikan 100 persen dibandingan tahun 2023 lalu.

"Bantuan baru ini baru bisa dicairkan kalau persetujuan dari gubernur telah ada. Artinya, kita masih menunggu hasil tim evaluasi dari Gubernur Sumbar," imbuh Tarmizi. (*)

SERBANEKA

Baru 92,88% Penduduk Sumbar jadi Peserta BPJS Kesehatan

PADANG - SINGGALANG

Sumatera Barat berada pada posisi 34, dari 33 provinsi di Indonesia yang sudah Universal Health Coverage (UHC) dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Dengan posisi itu Sumbar belum mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC).

Kondisi itu perlu menjadi perhatian pemerintah pusat, dan perlu dilakukannya percepatan peningkatan cakupan peserta.

"Provinsi Sumatera Barat masih berada pada angka persentase 92,88 persen dari jumlah penduduknya, sehingga masih butuh lebih dari 291.796 peserta, agar dapat memenuhi syarat RPJMN dengan target 98 persen cakupan peserta dari jumlah penduduk, dan mendapatkan predikat UHC," ujar Eddy Sulistijanto selaku Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II pada konferensi pers Percepatan Universal Health Coverage (UHC) Sumatra Barat Jumat (26/4).

Dalam meningkatkan cakupan peserta ini, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta melibatkan perangkat daerah setempat untuk mengupayakan strategi.

Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Lila Yanuar mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kepesertaan BPJS penduduk Sumbar. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan kabupaten dan kota di Sumbar.

Diakuinya, sebenarnya

Sumbar sudah bisa UHC jika Penerima BPJS Kesehatan (Penerima Bantuan Iuran) APBN dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato (JKSS) sesuai target.

Bahkan, katanya, Pemprov Sumbar sudah mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendukung dana sharing untuk memenuhi JKSS. Dimana sudah disepakati, Pemprov Sumbar membantu 20 persen dari alokasi dana sharing yang kabupaten dan kota. Kecuali Mentawai, Pemprov Sumbar membantu Mentawai membantu 30 persen.

"Hanya saja ada beberapa kabupaten dan kota yang minim mengalokasikan anggaran melalui JKSS. Akibatnya anggaran yang dialokasikan Pemprov Sumbar tidak teresap maksimal. Dampaknya masyarakat yang tertanggung juga tidak mencapai target," sebutnya.

Langkah yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sumbar untuk mencapai UHC adalah memaksimalkan kepesertaan melalui PBI APBN. Hanya saja kewenangan itu berada pada kabupaten dan kota. Karena peserta PBI sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kewenangan perubahan DTKS tersebut berada pada Kementerian Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial kabupaten dan kota.

"Jadi ini kewenangannya berada pada Dinas Sosial. Sebenarnya Sumbar dialokasikan 2 juta PBI. Karena ada pemutakhiran data, akhirnya Sumbar hanya menerima

1.795.362. Padahal ini bisa disisip secepatnya," pungkasnya.

Untuk diketahui dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2024, dengan tujuan memberikan jaminan Kesehatan yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan Bersama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia terus berupaya untuk melakukan percepatan capaian Universal Health Coverage (UHC).

Dalam pelaksanaan UHS BPJS Kesehatan juga terus melakukan transformasi mutu layanan. Memberikan layanan yang mudah, cepat juga setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Terutama masyarakat yang telah terdaftar pada program JKN-KIS.

Dengan inovasi terditalisasi, yang dapat diakses dengan mudah secara online oleh masyarakat. Baik melalui handphone atau komputer, seperti layanan antrian online, fitur display tempat tidur. Termasuk pengecekan informasi kepesertaan, obat dan pembayaran melalui fitur-fitur di aplikasi Mobile JKN.

Selain itu juga, pendaftaran secara online untuk peserta baru, sudah dapat diakses tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan dengan layanan Pendaftaran Administrasi via WhatsApp (PANDAWA). Dengan melakukan chat via aplikasi WhatsApp. Pandawa juga dapat diakses untuk melakukan perubahan identitas. (107)

LAHIRKAN PERDA SEBAGAI REGULASI

Pemerintah Terus Sokong UMKM

Solok, Singgalang

Dukungan pemerintah untuk menyokong perkembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) terus dilakukan. UMKM diharapkan terus menjadi salah satu penopang perekonomian daerah.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sumbar, Daswipetra saat menyosialisasikan peraturan daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2019 tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi

dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), baru-baru ini di Tanah Garam, Kota Solok.

Hadir pada kesempatan itu pemangku kepentingan dari pihak pemerintah kota Solok, kelurahan, kecamatan, ninik mamak, bundo kanduang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan ratusan masyarakat.

"Tujuan sosialisasi Perda ini agar masyarakat tahu bahwa pemerintah provinsi telah melahirkan



SOSIALISASI - Anggota DPRD Sumbar, Daswipetra saat menyosialisasikan Perda pada masyarakat di Solok. (ist)

regulasi untuk pemberdayaan dan perlindungan terhadap koperasi dan usaha kecil di Sumatera Barat," ungkapnya.

Daswipetra menekankan, keberadaan Perda nomor 16 tahun 2019 merupakan wujud bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Sumbar pada UMKM.

"Jadi ini adalah bentuk dukungan Pemprov Sumbar terhadap kegiatan koperasi dan UMKM yang dijalankan oleh masya-

rakat," tegasnya.

Tujuan adanya Perda ini adalah melindungi, mengayomi, dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap koperasi dan usaha kecil," pungkasnya.

Ia mengatakan, UMKM dan juga koperasi selama ini telah menjadi pelaku ekonomi aktif yang turut menopang perekonomian daerah. Perkembangan dan kemajuan UMKM akan pula memajukan daerah. (401)



KETERANGAN PERS - Deputy Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II bersama Kadiskes Sumbar, dr Lila Yanuar memberikan keterangan pada konferensi pers Percepatan Universal Health Coverage (UHC) Sumatera Barat Jumat (26/4). (yuke)



Senin, 29 April 2024
(20 Syawal 1445 H)

SUPARDI
KETUA DPRD
SUMBAR

IRSYAD SAFAR
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

SUWIRPEN SUIB
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

INDRA DT RAJO LELO
WAKIL KETUA
DPRD SUMBAR

RAELIS
SEKRETARIS
DPRD SUMBAR

SOSIALISASI PERDA WAKIL KETUA DPRD SUMBAR, SUWIRPEN SUIB :

Mari Bersama Jauhkan Generasi Muda dari Narkoba

SOLOK - SINGGALANG

Dampak dari penyalahgunaan narkoba sudah tentu menciptakan para pemakai menjadi rusak secara fisik dan mental. Apalagi sebagian besar penggunaannya adalah generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa

"Bahkan, bahaya narkoba kita rasakan tak hanya mengancam masyarakat yang tinggal di kota, tapi juga yang tinggal di pelosok kampung," ungkap



Wakil Ketua DPRD, Sumbar, Suwirpen Suib ketika menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) di jorong Mandailing Koto Laweh, Kabupaten Solok, beberapa hari yang lalu.

Pada kesempatan itu, H. Suwirpen Suib menyosialisasikan Perda Nomor 9 Tahun 2018 tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat Adiktif lainnya.

"Tentu kita tidak ingin masyarakat kita, terutama anak-anak generasi penerus bangsa terjerat penyakit berbahaya dan mengerikan ini," katanya.

Suwirpen mengatakan bahwa dari data yang di dapat dari pemerintah provinsi Sumatera Barat, pengguna narkoba sudah mencapai 1,1 persen atau sudah di angka 68 ribu pengguna di Sumbar. Data itu merupakan data dari tahun 2018 dan belum lagi jika di tambah dengan data yang terbaru saat ini.

"Kondisi ini sangat miris. Keadaan di Sumbar akan semakin mengkhawatirkan jika tidak kita tangani secara serius," ujarnya.

Suwirpen memaparkan, penyebab utama dari pengguna narkoba adalah berawal dari masalah di lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Lalu ditambah pula pengawasan orang tua yang tidak maksimal.

Misalnya ada persoalan yang timbul berawal dari keluarga, contohnya konflik internal antara orang tua yang mengakibatkan perceraian dan faktor lain sehingga menyebabkan ketidaknyamanan si anak berada di lingkungan rumah. Alhasil mereka mencari hiburan yang salah menempatkan diri sehingga terseret kepada pergaulan yang notabene adalah rekan pengguna narkoba. Awal mulanya hanya coba-coba dan akhirnya menjadi penacandu.



Untuk menangkal penyalahgunaan narkoba ini semakin meluas, pemerintah terus berusaha menyosialisasikan perda ini dengan menggandeng alim ulama, majlis taklim serta kelompok pemuda atau ormas pemerhati masalah sosial. Sehingga tingkat kesadaran dari generasi muda dan pengawasan orang tua serta lingkungan sekitar dapat dimaksimalkan.

Menurut Suwirpen Suib, penyalahgunaan narkoba akan sering melakukan gesekan-gesekan sosial yang berujung pada tindakan kriminalitas.

"Tingkat kriminalitas meningkat, generasi muda rusak,

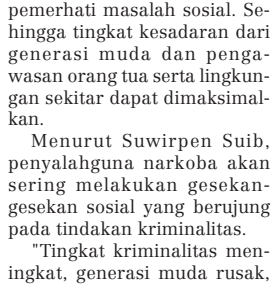
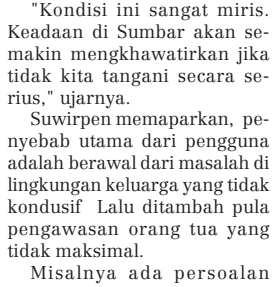
tatanan sosial juga mengalami kerapuhan, ini baru sebagian bahaya narkoba," ucapnya.

Suwirpen menilai jika Perda nomor 9 tahun 2018 ini tersosialisasi dengan baik, maka

akan sangat efektif untuk menekan peredaran narkoba di Sumbar, termasuk di Kabupaten Solok.

"Lingkungan juga berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pendidikan anak. Ketika lingkungan rumah tangga, sekolah, bahkan lingkungan masyarakat tidak memiliki komitmen dan pemahaman terhadap ancaman narkoba, maka itu akan menjadi pintu masuknya peredaran narkoba," tuturnya.

Kegiatan sosialisasi perda ini dihadiri pemangku kepemimpinan, ninik mamak, bundo kuduang, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan masyarakat.*



SERBANEKA



AMANKAN
Kasat ResNarkoba, AKP Eriyanto, bersama anggotanya saat mengamankan dua orang tersangka AZ dan ES di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aia Kuniang, Kecamatan Pasaman, Sabtu (27/4).
(HumasRes Pasbar)

Sempat Melarikan Diri Dua Pelaku Narkoba Diamankan

PASBAR - SINGGALANG

Jajaran Polres Pasaman Barat, kembali melakukan penangkapan terhadap dua pelaku berinisial AZ (39) dan ES (25) yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika golongan 1, Sabtu (27/4).

Kedua pelaku berhasil diamankan tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat di Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning, Kecamatan Pasaman.

"Kedua pelaku kita amankan terkait adanya laporan masyarakat dan telah meresahkan bahwa di daerah itu sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi Narkotika jenis sabu. Kedua pelaku di-

amankan sekira pukul 17.15 WIB," Kata Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik pada, Minggu (28/4).

Penangkapan itu berawal setelah petugas menelusuri lokasi dan melakukan penyidikan tepatnya di jalan water boom Jorong Padang Tujuh, Nagari Aur Kuning. Petugas mencurigai adanya dua lelaki yang sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega datang dari arah dalam water boom.

"Melihat kedua pelaku mencurigakan, kita menghentikan sepeda motor itu dan kedua pelaku mencoba untuk melarikan diri. Alhasil pelaku dapat dihentikan petugas," katanya.

Petugas langsung menghubungi Kepala Jorong setempat, untuk menyaksikan penggeledahan terhadap kedua

pelaku AZ (39) dan ES (25). Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti yang berada di atas rumput dekat kedua pelaku diamankan berpa satu bungkus plastik klip warna bening diduga berisi narkotika jenis sabu dan kedua pelaku mengakui barang haram tersebut adalah miliknya.

"Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut sempat dibuang oleh pelaku AZ karena ingin mencoba menghilangkan barang bukti saat melihat kedatangan petugas," ucapnya.

Saat diinterogasi, Narkotika jenis sabu tersebut, rencana nanya akan diedarkan oleh pelaku di daerah Kapa, Kecamatan Luhak Nan Duo. Sedangkan sepeda motor yang digunakan adalah milik pelaku ES.

Dikatakan, untuk men jem-

put barang haram tersebut, ES akan memberikan sabu itu untuk dikonsumsi AZ. Sementara pelaku AZ juga diketahui merupakan residivis dalam perkara Narkotika jenis ganja kering di wilayah hukum Polres Agam yang ditangkap pada tahun 2019 yang lalu.

Dikatakan, dari kedua pelaku, petugas menyita barang bukti berupa satu bungkus plastik klip ukuran sedang warna bening diduga berisi Narkotika jenis sabu dan satu unit sepeda motor merk Ya maha Vega warna silver kom binasi biru dengan Nomor Polisi BA 5284 FF.

"Kedua pelaku beserta barang bukti, saat ini sudah berada di Mapolres Pasaman Barat untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut," jelasnya. (arafa)

Tiga Anak Dibawah Umur Pelaku Curanmor Diamankan

BATUSANGKAR - Tiga anak laki-laki dibawah umur pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) roda dua (R2) berinisial RH (15), RM (15) dan RS (14), berhasil diamankan jajaran Sat Reskrim Polres Tanah Datar, Kamis (25/4).

Tiga terduga, jelas Kapolres Tanah Datar, AKBP Derry Indra, S.I.K melalui Kasat Reskrim Polres Tanah Datar Iptu Ary Andre Jr, M.H., didampingi Humas Polres Gusrizal, Sabtu (27/4) di Batusangkar, masih berstatus sebagai pelajar.

Menurut Kasat Andre, ketiga pelajar itu dibekuk, Kamis (25/4). Sementara pencurian itu terjadi, Senin (22/4) di Kecamatan Lima Kaum.

Saat itu, jajaran Sat Reskrim Polres Tanah Datar juga berhasil mengamankan satu unit sepeda motor sebagai barang bukti (BB) dalam kasus Curanmor tersebut. Ketiga terduga pelaku dan BB sudah diamankan di Polres Tanah Datar untuk pemeriksaan.

Selanjutnya terhadap ketiga tersangka dijerat dengan pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4e dan 5e KUHPidana Jo UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. (522)

MTQ TINGKAT AGAM KE-41

Kafilah Lubuk Basung Targetkan Lima Besar

LUBUK BASUNG - Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung, tengah mempersiapkan kafilah untuk menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional tingkat Kabupaten Agam ke 41 tahun ini.

Bertindak sebagai tuan rumah MTQN tingkat Kabupaten Agam adalah Kecamatan Tilatang Kamang, dengan pelaksanaan minggu ketiga Mei 2024 selama sepekan.

"Kini kita masih proses seleksi kafilah untuk mewakili Kecamatan Lubuk Basung di MTQN tingkat kabupaten," kata Camat Lubuk Basung,

Ricky Eka Putra, Jumat (26/4).

Seleksi ini diawali dengan pelaksanaan MTQN tingkat kecamatan yang akan diikuti sekitar 80 kafilah dari seluruh nagari. "MTQN tingkat kecamatan itu akan digelar 4 Mei 2024, dengan memperlombakan 4 cabang," katanya.

Nanti, katanya, peraih juara I, II dan III setiap cabang dan golongan diseleksi kembali, hasilnya diserahkan ke LPTQ untuk mewakili Lubuk Basung ke MTQN tingkat Kabupaten Agam ke-41.

Selain itu, katanya, juga diseleksi santri MDA/TPQ dan anak nagari yang berpotensi meskipun bersekolah di luar. "Kita targetkan kafilah Lubuk Basung untuk MTQN kabupaten tahun ini 75 orang, yang akan mengikuti seluruh cabang lomba. Terkait peringkat, kita menargetkan lima besar," katanya. (210)



RICKY EKA PUTRA